

# Evaluasi dan Standardisasi Kualitas Mutu Pakaian Dinas Harian (PDH) Polri Guna Mendukung Tugas Pokok Polri

Harvin Raslin, dkk<sup>1</sup>  
Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri  
Harvinraslin8892@gmail.com

## ABSTRAK

Pakaian seragam PDH Polri adalah salah satu penanda bagi cerminan identitas jati diri, status, hierarki, dan kedisiplinan. Karena itu, pakaian seragam PDH Polri memiliki nilai simbolik, ekspresi cara hidup personel Kepolisian, dan sekaligus perwujudan dari pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pakaian seragam dalam Kepolisian terdiri dari dua macam, yaitu seragam umum dan seragam khusus dan memiliki beberapa prinsip seperti Nesesitas, Keseragaman, Estetika dan Akuntabel. Tulisan ini membahas penyamaan standar terhadap Pakaian Dinas Polri baik dari segi warna maupun bahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan standar kualitas bahan baku pakaian dinas harian Polri, baik dari segi aspek warna, komposisi, nomor benang, anyaman dan jahitan, serta menemukan faktor kendala yang mempengaruhi kualitas pakaian dinas Polri. Data hasil penelitian kualitatif dianalisis berdasarkan metode analisis kualitatif deskriptif, sedangkan data hasil penelitian kuantitatif dihitung berdasarkan metode analisis deskriptif proporsi elaborasi. Proses perhitungan dilakukan dengan menggunakan program *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan masih banyaknya perbedaan komposisi seragam dan variasi warna pada tingkat Polda terutama pada wilayah timur. Temuan yang menjadi sorotan terdapat pada aspek komposisi bahan dan warna yang bervariasi pada beberapa Polda.

**Kata kunci** : Standardisasi, Pakaian Dinas Harian, Seragam Polri, Identitas Polri.

## ABSTRACT

*The PDH Polri uniform is one of the markers for the reflection of identity, status, hierarchy, and discipline. Therefore, the PDH Polri uniform has a symbolic value, an expression of the way of life of the Police personnel, and is at the same time the embodiment of Article 5 paragraph (2) of Law Number 2 of 2002. Uniforms in the Police consist of two types, namely general uniforms and special uniforms. and has several principles such as Necessity, Uniformity, Aesthetics and Accountability. This paper discusses the standardization of the Police Service attire, both in terms of color and material. The purpose of this study was to determine the quality standards of the raw materials for daily police clothing, both in terms of color, composition, thread number, webbing and stitching, as well as finding constraining factors that affect the quality of police service clothing. The data from the qualitative research were analyzed based on the descriptive qualitative analysis method, while the data from the quantitative research was calculated based on the elaboration proportion descriptive analysis method. The calculation process is carried out using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program. The results of this study indicate that there are still many differences in uniform composition and color variations at the Polda level, especially in the eastern region. The findings that are highlighted are in the aspect of the composition of materials and colors that vary in several Polda.*

**Keywords** : Standardization, Daily Service Clothes, Police Uniforms, Police Identity.

## PENDAHULUAN

---

<sup>1</sup> Indro Wiyono, Guntur Setyanto, Syamsudin Djanieb, Azis Saputra, Priya Handana, Marwan Syukur, Winter Time S., Wayan Krisna YP., AA Putri Suciptawati, Katrina J. Ratu, Ahmad Munif, Sakti Widodo, Eka Chandra H., Mulyanto, Sosianti, Mindarti, Agus Siswanto, Whisnu Argo Bintoro, Nur Teguh, Nurkholik, Robi Wardiansyah, Dedi Hidayat.

Salah satu misi Polri adalah mengelola sumber daya Polri secara profesional, modern dalam mencapai tujuan yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri, karena persaingan yang begitu keras harus didukung pula oleh pengelolaan sumber daya Polri yang bisa mengatur, mengurus sumber daya organisasi berdasarkan visi misi organisasi sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran secara optimal, hal ini berlaku untuk semua tatanan organisasi modern yang mempersyaratkan pentingnya aspek kompetensi terkait pengawakan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang pengelolaan sumber daya. Salah satu misi Polri adalah mengelola sumber daya Polri secara profesional, modern dalam mencapai tujuannya yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri.

Oleh karena itu, pembangunan dan pengembangan sumber daya Polri (*resources*) diarahkan untuk menyerap nilai-nilai reformasi Polri dalam menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dengan prioritas pada aspek kultural, perubahan mindset dan kultur set pada seluruh bidang kepemimpinan dan pada strata kepangkatan maupun pendidikan dan pelatihan. Hal ini dimaksudkan untuk mengakselerasikan pencapaian sasaran-sasaran strategis dan perilaku para anggota Polri yang memiliki nilai reformasi yang berdimensi keunggulan, integritas, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Menyadari arti dan pentingnya fungsi logistik Polri merupakan salah satu aset utama organisasi di bidang sumber daya Polri, maka secara strategis pengembangan fungsi logistik Polri haruslah diarahkan pada upaya untuk pemenuhan analisis kebutuhan personel organisasi dan peruntukannya dalam rangka mendukung mobilisasi gerak langkah personel dan operasi Kepolisian di lapangan, terutama dalam menjalankan visi misi, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran secara optimal.

Aspek penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan sumber daya Polri di bidang logistik berkaitan dengan aspek penerapan/implementasi di bidang TQM, yakni tentang arti pentingnya perwujudan standard kualitas (mutu) di bidang sarana prasarana dan material Polri yang meliputi aspek perbekalan peralatan dan faskon bangunan Polri secara umum dan khususnya aspek material Polri di bidang alat material khusus (Almatsus), Alpakam, dan Alsus Polri. Selain itu, bidang logistik Polri terkait dengan pemenuhan perlengkapan menyangkut perbekalan perorangan dan perlengkapan tugas personel, baik perorangan, satuan, dan operasional Kepolisian salah satunya adalah Kapor PDH Polri yang merupakan unsur penting dari Almatsus Polri di bidang simbol Kapor PDH seragam Polri berikut lambang atribut untuk Polisi berseragam.

PDH Polri harus senantiasa memperhatikan aspek kondisi geografis wilayah penugasan, yang berlandaskan pada kualitas (mutu) dan spektek/STBU yang dipersyaratkan oleh Slog Polri antara lain meliputi standar warna paten Polri, komposisi bahan baku, sistem pewarnaan bahan, komposisi bahan, ukuran benang, rajutan dan kerapian jahitan bahan, dan sebagainya. Hal ini amat penting untuk diwujudkan secara nyata, utuh, realistis, rasional, terukur, bertahap dan konsisten sebagai salah satu strategi mewujudkan aspek pemenuhan kebutuhan anggota Polri.

Karena itu, perlu dilakukan survei pasar tentang indeks biaya harga bahan baku baju seragam Polri yang setiap saat selalu berubah, termasuk besaran indeks biaya ongkos jahit pakaian seragam dinas (PDH) anggota Polri yang faktanya masing-masing daerah provinsi dan kabupaten dan kota cukup bervariasi, indeks harga di 34 Polda. Maka, penting untuk melakukan *update* harga pasar yang sangat berguna untuk memudahkan perumusan dan penyesuaian kenaikan indeks harga bahan baku dan ongkos jahit di pasaran yang setiap saat selalu berubah. Dengan terpenuhinya aspek pemenuhan kebutuhan standardisasi dan kualitas (mutu) pada aspek bidang perbekalan umum Polri khususnya Almatsus Kapor di bidang pakaian seragam dinas harian (PDH) bagi anggota Polri.

Penerapan manajemen sistem pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan sistem pengadaan distribusi dan penggelaran Matfasjas di bidang Kapor pakaian dinas seragam harian (PDH) secara umum sudah dilaksanakan melalui pelaksanaan, pengadaan, pembelian, dalam bentuk belanja modal dengan menggunakan alokasi indeks anggaran pemerintah yang telah ditetapkan dalam DIPA tahunan Polri. Hal itu melalui APBN maupun APBN-P per tahun sesuai dengan pagu alokasi indeks anggaran Polri yang diusulkan oleh Srena Polri secara umum kepada pemerintah.

Namun, dalam tataran empiris aspek pemenuhan kualitas mutu akan kebutuhan bekal umum di bidang Almatsus Kapor perorangan tersebut terkait dengan pengadaan/pembelian, distribusi dan penggelaran pakaian seragam dinas harian (PDH) bagi anggota Polri khususnya untuk kebutuhan polisi berseragam, bila dilihat dari variabel kualitas (mutu) cenderung kualitasnya tidak sama dan masih bervariasi warna paten pakaian seragam dinas harian (PDH) Polri. Padahal,

nomor paten pakaian seragam warnanya coklat Polisi. Variasi warna paten sangat mungkin disebabkan proses pengadaan Almatsus Kapor pakaian dinas seragam tersebut masih parsial tersebar di masing-masing Satker fungsi dan Satuan Kewilayahan Polda. Pengadaan tidak lagi terpusat di Slog Polri selaku pelaksana pengadaan utama dan pembina fungsi logistik Polri.

Dampak negatif dari sistem desentralisasi pengadaan seragam pakaian PDH anggota Polri yang tidak lagi secara terpusat dilaksanakan di tingkat Mabes adalah ketidakseragaman pada jenis warna dan kualitas dan komposisi bahan baku pakaian dan sebagainya. Akibatnya ialah terjadi disparitas indeks harga bahan baku pakaian seragam dan standard warna paten pakaian yang tidak seragam di tiap-tiap Polda. Walaupun jenis warna coklatnya sama, bahan bakunya sama, yang membedakan adalah sistem proses pewarnaan pada pabrik tekstil. Demikian pula dengan kondisi standar warna paten celana dinas seragam polisi. Kenyataan di lapangan ada yang berseragam coklat tua, coklat agak kehitam-hitaman, dan lain-lain. Kondisi ini cenderung berbeda apabila membandingkan antara Kepolisian dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik TNI AU, AL, maupun TNI AD yang telah memiliki standar baku warna paten dan sistem pengadaannya tidak didesentralisasi penuh, seperti yang ada di institusi kepolisian.

Sistem pengadaan Kapor pakaian dinas harian Polisi (PDH) yang didesentralisasi di tingkat satwil/polda pada awalnya bertujuan untuk mempercepat pelayanan dan distribusi barang Kapor kepada anggota Polisi. Namun, ternyata hal itu memiliki dampak negatif, yakni kurang memperhatikan aspek kualitas, baik dari segi warna, komposisi bahan baku, rajutan, ukuran benang, dan varibel biaya jahit.

Jika pengadaan Kapor pakaian dinas harian Polisi (PDH) disentralisasi, dampak positifnya ialah adanya jaminan kualitas (*quality*) keseragaman bahan baku, baik dari segi warna, komposisi bahan, rajutan, dan ukuran benang. Namun, sistem sentralisasi pengadaan PDH Polri memiliki dampak negatif, yakni menjadikan birokrasi lebih panjang dan distribusi barang menjadi kurang cepat.

Berdasarkan hal itu, penelitian tentang implementasi aspek pengawasan kualitas (mutu) perbekalan umum Polri di bidang perlengkapan tugas personel, khususnya Almatsus Kapor pakaian seragam dinas harian (PDH) Polri perlu dilakukan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi. Hal itu berdasarkan prinsip dasar bahwa pakaian seragam dan tanda pangkat PDH Polri merupakan bagian dari simbol identitas organisasi Polri. Konsep simbol sangat menarik bila diimplementasikan dalam dunia Kepolisian/Polri, sebab selama ini studi tentang Kepolisian selalu dikaitkan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemeliharaan Kamtibmas, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, politik, ekonomi, hukum dan pelanggaran HAM (penegakan dan fungsi HAM).

## METODE

Populasi penelitian ini adalah seluruh personel Polri yang bertugas di satuan kewilayahan, yang jumlahnya diperkirakan 470.400 orang (Sipp Polri, 20/11/2019). Sampelnya adalah personil Polri yang bertugas di 11 Polda, yaitu Polda Metro Jaya, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur dan Jambi. Sampel dipilih berdasarkan metode sampling *purposive* dengan mengacu pada keterwakilan Polda berdasarkan kewilayahan provinsi dan alokasi anggaran. Adapun pelaksanaan kegiatan dan lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jadwal kegiatan dan lokasi penelitian

No	Polda Sampel	Pelaksanaan
1	Metro Jaya	27 - 30 Januari 2020
2	Sumut	27 - 30 Januari 2020
3	Kepri	3 - 6 Februari 2020
4	Bengkulu	3 - 6 Februari 2020
5	Kalbar	10 - 13 Februari 2020
6	Sulteng	10 - 13 Februari 2020
7	Jatim	17 - 20 Februari 2020
8	Sulut	17 - 20 Februari 2020
9	NTT	24 - 27 Februari 2020
10	Sulsel	24 - 27 Februari 2020

Responden penelitian dibagi dalam dua kelompok yaitu, responden penelitian kualitatif yang terdiri dari para pejabat utama Polda dan Polres sampel sebanyak 380 orang. Sementara itu, responden penelitian kuantitatif sebanyak 3.087 orang dari kelompok Tamtama dan Bintara, serta 988 orang dari kelompok Pama dan Pamen.

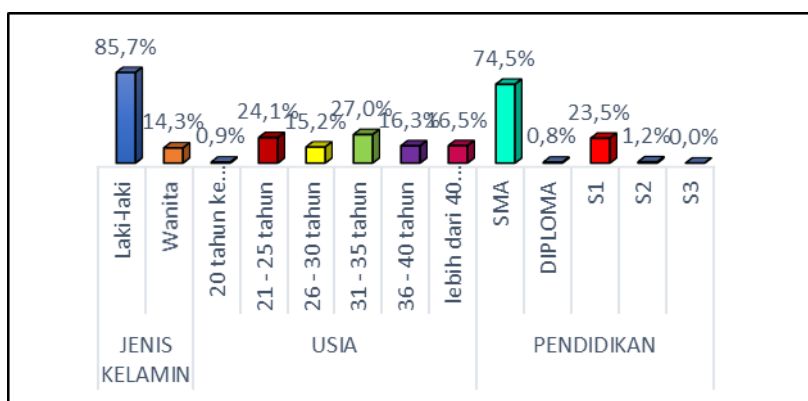
Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mix method*), yaitu gabungan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif. Metode pengumpulan data untuk penelitian kualitatif melalui wawancara dan diskusi mendalam, sedangkan untuk penelitian kuantitatif melalui pengisian kuesioner atau angket digital (daring). Penggunaan instrument kuesioner bertujuan mendapatkan data tentang standar warna, kualitas kain, estetika, kepuasan personil pada PDH pembagian dan manajemen logistik, sehingga variabel yang diukur adalah pengetahuan responden pada standar warna coklat Polri dan kualitas bahan PDH Polri, pendapat tentang efisiensi dan efektivitas pengadaan dan pendistribusian PDH Polri.

Data hasil penelitian kualitatif dianalisis berdasarkan metode analisis kualitatif deskriptif, sedangkan data hasil penelitian kuantitatif dihitung berdasarkan metode analisis deskriptif proporsi elaborasi. Proses penghitungan dilakukan dengan menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)*.

**HASIL**

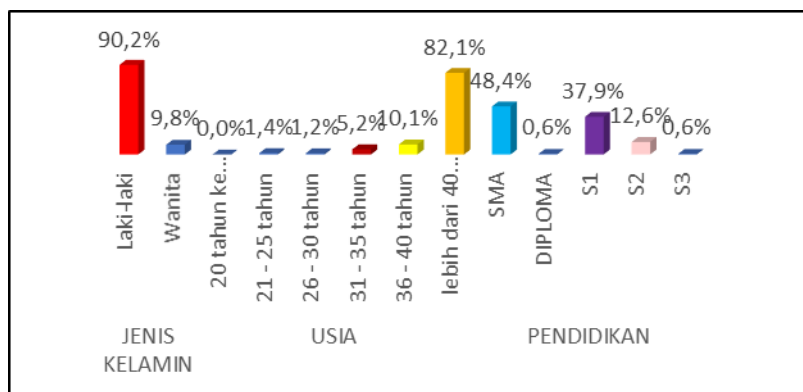
**A. Profil Responden**

Jumlah responden kelompok Bintara dan Tamtama, sebanyak 3.087 orang. Ditinjau dari segi jenis kelamin : 85,7% laki-laki dan 14,3% wanita. Ditinjau dari segi usia : 0,9% di bawah 20 tahun, 24,1% antara 21 sampai 25 tahun, 15,2% antara 26 tahun sampai 30 tahun, 27% antara 31 tahun sampai 35 tahun, 16,3% antara 36 tahun sampai 40 tahun dan 16,5% lebih dari 40 tahun. Ditinjau dari segi pendidikan : 74,5% SMA, 0,8% Diploma, 23,5% S1, 1,2% S2 dan 0% S3 , dengan sebagian besar (99,3%) adalah kelompok Bintara. Berikut adalah gambar *barchat* profil responden Bintara dan Tamtama ditinjau dari jenis kelamin, usia, dan pendidikan :



Gambar 1. Profil responden Bintara dan Tamtama dari segi jenis kelamin, usia, dan pendidikan

Jumlah responden kelompok Perwira, sebanyak 988 orang. Ditinjau dari segi jenis kelamin 90,2% laki-laki dan 9,8% wanita. Ditinjau dari segi usia : 0% di bawah 20 tahun, 1,4% antara 21 sampai 25 tahun, 1,2% antara 26 tahun sampai 30 tahun, 5,2% antara 31 tahun sampai 35 tahun, 10,1% antara 36 tahun sampai 40 tahun dan 82,1% lebih dari 40 tahun. Ditinjau dari segi pendidikan : 48,4% SMA, 0,6% Diploma, 37,9% S1, 12,6% S2 dan 0,6% S3 , dengan sebagian besar (80,4%) adalah kelompok Pama. Berikut adalah gambar *barchat* profil responden Perwira ditinjau dari jenis kelamin, usia, dan pendidikan.



Gambar 2. Profil responden Perwira dari segi jenis kelamin, usia, dan pendidikan

## B. Hasil Penelitian Survei dan Analisis

### 1. Aspek kualitas mutu bahan pakaian PDH

Ada indikator yang digunakan sebagai dasar analisis untuk menelaah kualitas mutu bahan pakaian PDH Polri pada penelitian ini, adalah mencakup :

- Serat benang dan komposisinya
- Pewarnaan
- Tingkat kekusutan pakaian
- Tingkat kelunturan warna
- Tingkat kesobekan

Berdasarkan dari hasil analisis diperoleh temuan tentang kualitas kain atau bahan PDH Polri “pembagian” sebagai berikut.

#### a) Serat Benang dan Komposisi Bahan Pakaian

Tabel 2: Pengetahuan tentang bahan PDH Polri

Tamtama dan Bintara (%)			Perwira (%)			Akumulasi (%)		
Tidak mengetahui	Kurang mengetahui	Mengetahui	Tidak mengetahui	Kurang mengetahui	Mengetahui	Tidak mengetahui	Kurang mengetahui	Mengetahui
63.1	27.5	9.4	62.1	26.8	11.1	62.6	27.15	10.25

Pada tabel 2 tampak bahwa sebagian besar personel Polri (89,75%) tidak mengetahui tentang serat benang dan komposisinya pada PDH Polri pembagian yang mereka terima. Hal ini berarti bahwa sebagian besar anggota Polri tidak tahu mutu serat benang dan komposisinya pada bahan PDH Polri atau mungkin tidak tahu tentang kain bahan PDH Polri yang standard.

#### b) Standar warna coklat patent PDH Polri

Tabel 3. Pendapat tentang warna coklat paten PDH Polri

Tamtama dan Bintara (%)			Perwira (%)			Akumulasi (%)		
Tidak sesuai	Kurang sesuai	Sesuai	Tidak sesuai	Kurang sesuai	Sesuai	Tidak sesuai	Kurang sesuai	Sesuai
34.6	48.8	16.6	44.6	43.3	12.1	39.6	46.05	14.35

Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar personel Polri (85,65%) berpendapat bahwa, standar warna coklat PDH Polri pembagian, yang mereka terima (coklat muda untuk baju, coklat tua untuk celana/rok) belum sesuai dengan standar coklat PDH Polri yang seharusnya, sehingga ada kecenderungan keseragaman warna di kewilayahan belum homogen. Artinya, Polri belum memiliki/memberitahukan standar warna paten bahan PDH Polri.

c) Kekusutan setelah dicuci (aspek kualitas)

Tabel 4. Pendapat tentang kekusutan PDH Polri setelah dicuci

Tamtama dan Bintara (%)		Perwira (%)		Akumulasi (%)	
Tidak kusut	Selalu kusut	Tidak kusut	Selalu kusut	Tidak kusut	Selalu kusut
20.3	79.7	21.6	78.4	20.95	79.05

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar personel Polri (79,05%) berpendapat bahwa PDH Polri pembagian, selalu kusut setelah dicuci, sehingga kalau akan dipakai harus dihaluskan dulu (disetrika). Artinya, kualitas komposisi serat benang bahan PDH Polri pembagian kurang bagus.

d) Kelunturan karena proses pencucian, proses penyetricaan dan pemakaian (Aspek kualitas)

Tabel 5. Pendapat tentang kelunturan PDH Polri pembagian setelah dicuci, disetrika, dan dipakai

Tamtama dan Bintara (%)		Perwira (%)		Akumulasi (%)	
Tidak luntur	Luntur	Tidak luntur	Luntur	Tidak luntur	Luntur
18.2	81.8	20.4	79.6	19.3	80.7

Tabel 5 menunjukkan sebagian besar personil Polri (80,7%) berpendapat bahwa PDH Polri pembagian, luntur setelah dicuci, disetrika dan dipakai. Artinya, kualitas pewarnaan PDH Polri yang dibagikan kurang bagus.

e) Frekuensi pencucian yang menyebabkan kelunturan (aspek kualitas)

Tabel 6. Kelunturan PDH Polri pembagian karena frekuensi pencucian

Frekuensi pencucian	Pendapat (%)		Akumulasi
	Tamtama dan Bintara	Perwira	
1 – 2 kali	9.9	10.1	10
3 – 4 kali	20.2	20.4	20.3
5 – 6 kali	18.9	19.3	19.1
7 – 8 kali	13.4	11.6	12.5
Lebih dari 8 kali	37.6	38.6	38.1

Pada tabel 6 tampak bahwa ada kecenderungan PDH Polri pembagian akan luntur dan tidak layak pakai setelah dicuci lebih dari delapan kali. Terjadinya kelunturan warna pada pakaian PDH Polri karena proses pencucian dan pemakaian pada pertama kali adalah hal yang alamiah. Akan tetapi, jika PDH Polri tersebut tetap luntur pada pencucian yang ketiga kali, maka selain karena proses pencucian, penjemuran dan penstriaan yang kurang baik, juga menggambarkan bahwa standar kelayakan kualitas (mutu) bahan PDH Polri masih pada kategori rendah.

f) Bagian yang paling cepat luntur pada saat dicuci

Tabel 7. Bagian PDH Polri pembagian yang paling cepat luntur karena pencucian

Bagian yang paling cepat luntur	Pendapat (%)		Akumulasi
	Tamtama dan Bintara	Perwira	
Baju	29.6	5.2	17.4
Celana/rok	4.6	27	15.8
keduanya	53.1	49.7	51.4
Tidak ada kelunturan	12.7	18.1	15.4

Tabel 7 menunjukkan ada kecenderungan kedua bagian PDH Polri pembagian (baju dan celana/rok) akan luntur pada setiap proses pencucian.

g) Tingkat kesobekan (aspek Kualitas)

Tabel 8. Pendapat tentang kesobekan PDH Polri pembagian

Tamtama dan Bintara (%)		Perwira (%)		Akumulasi (%)	
Tidak mudah sobek	Mudah sobek	Tidak mudah sobek	Mudah sobek	Tidak mudah sobek	Mudah sobek
71.8	28.2	83.2	16.8	77.5	22.5

Pada tabel 8 tampak ada kecenderungan PDH Polri pembagian tidak mudah sobek pada beberapa kali pemakaian yang pertama. Hal itu berkaitan dengan kualitas kain (PDH) saat dipakai sehari-hari dilihat dari aspek tingkat kekuatan kain dari ketahanan terhadap kesobekan.

## 2. Aspek kenyamanan pakaian PDH Polri saat ini

Ada beberapa indikator yang digunakan untuk membahas analisis mengenai kenyamanan pakaian dari PDH Polri :

- Rasa panas yang dirasakan pada saat pakaian tersebut dipakai
- Terjadinya penyusutan pakaian karena proses pencucian
- Kesesuaian ukuran dan kecocokan estetika PDH
- Prilaku/ tindakan personil
- Solusi bila PDH Polri yang dibagikan tidak sesuai

Dari indikator diatas diperoleh data dilapangan sebagai berikut:

a) Rasa panas saat dipakai

Tabel 9. Pendapat tentang rasa panas pada saat PDH dipakai

Tamtama dan Bintara (%)		Perwira (%)		Akumulasi (%)	
Tidak terasa panas	Terasa panas	Tidak terasa panas	Terasa panas	Tidak terasa panas	Terasa panas
12.9	87.1	15.3	84.7	14.1	85.9

Tabel 9 menunjukkan sebagian besar personel Polri (85,9%) berpendapat bahwa PDH Polri pembagian pada saat dipakai terasa panas. Artinya, kandungan komposisi serat benang bahan PDH Polri pembagian cenderung lebih besar bahan sintesis nonkapas.

b) Penyusutan bahan karena pencucian pertama

Tabel 10. Pendapat tentang penyusutan PDH Polri pembagian karena pencucian yang pertama

Tamtama dan Bintara (%)		Perwira (%)		Akumulasi (%)	
Tidak mudah susut	Mudah susut	Tidak mudah susut	Mudah susut	Tidak mudah susut	Mudah susut
38.5	61.5	44.3	55.7	41.4	58.6

Tabel 10 menunjukkan bahwa kain bahan pakaian seragam untuk PDH Polri ada kecenderungan susut mulai pada pencucian yang pertama kali. Karena sampai saat ini PDH Polri sering dibagikan dalam bentuk pakaian jadi. Ada dua kemungkinan penyebab terjadinya proses penyusutan pada pencucian pertama kali. Pertama, bahan pakaian belum memenuhi standar kualitas (mutu) kelayakan pakaian seragam PDH Polri. Kedua, sebelum proses penjahitan, tidak dilakukan terlebih dahulu melalui proses pencucian.

- c) Kenyamanan dan kecocokan ukuran PDH Polri, yang dibagikan dalam bentuk pakaian jadi

Tabel 11. Kenyamanan dan kecocokan ukuran PDH Polri yang dibagikan dalam bentuk pakaian jadi

Segi yang dinilai	Pendapat (%)		Akumulasi
	Tamtama & Bintara	Perwira	
Kenyamanan	Tidak nyaman	31.6	30.75
	Kurang nyaman	59.4	60
	Nyaman	8.9	9.25
Kecocokan ukuran	Tidak sesuai	66.2	66.2
	Kurang sesuai	30.8	30.15
	Sesuai	3	3.65

Tabel 11 menunjukkan bahwa ditinjau dari kecocokan/kesesuaian ukuran PDH dengan anatomi tubuh anggota, personel yang mendapatkan PDH dengan ukuran yang cocok dengan anatomi tubuhnya hanya sekitar 4 %. Sementara itu, personel yang mendapatkan PDH dengan ukuran tidak cocok sebesar 96%. Hal ini harus mendapatkan perhatian serius karena persentase yang tidak cocok dengan anatomi tubuhnya sangat besar.

- d) Perlakuan pada PDH Polri pembagian kalau tidak nyaman dan/atau ukuran tidak sesuai dengan ukuran tubuh anggota Polri

Tabel 12. Perlakuan personel pada PDH Polri jika kenyamanan dan ukuran tidak dipenuhi

Tamtama dan Bintara (%)		Perwira (%)		Akumulasi (%)	
Tidak divermak	Divermak	Tidak divermak	Divermak	Tidak divermak	Divermak
4.3	95.7	7.1	92.8	5.75	94.25

Tabel 12 menunjukkan bahwa jika personel mendapatkan PDH yang tidak sesuai dengan anatomi tubuhnya, sebagian besar personel Polri (94,25%) akan merombak PDH Polri pembagian dalam bentuk pakaian jadi kalau modelnya tidak/kurang nyaman dan ukurannya tidak/kurang sesuai. Biaya yang dikeluarkan untuk merombak PDH antara Rp20.000-- 100.000. Hal itu bergantung pada kriteria perombakan. Artinya, pembagian PDH Polri dalam bentuk pakaian jadi justru cenderung menambah pengeluaran personel Polri.

- e) Solusi bila pakaian PDH Polri yang dibagikan tidak sesuai harapan/ukuran

Tabel 13. Pengadaan PDH Polri secara mandiri

Tamtama & Bintara (%)			Perwira (%)			Akumulasi (%)		
Tidak pernah	Kadang-kadang	Selalu	Tidak pernah	Kadang-kadang	Selalu	Tidak pernah	Kadang-kadang	Selalu
2.6	16.4	81	2.3	13.8	83.9	2.45	15.1	82.45

Tabel 13 menunjukkan bahwa sebagian besar personel Polri (97,55%) melakukan pengadaan PDH Polri secara mandiri, baik secara insidental maupun berkala agar memiliki PDH yang nyaman, sesuai dengan ukuran badannya, dan untuk cadangan

### 3. Aspek manajemen logistik PDH Polri

Ada beberapa indikator yang digunakan untuk membahas analisis mengenai aspek manajemen logistik dari PDH Polri :

- Anggaran pengadaan PDH
- Frekuensi pengadaan PDH
- Efisiensi dan Efektifitas pembagian PDH



- Desentralisasi pengadaan

Dari indikator diatas diperoleh data dilapangan sebagai berikut:

a) Anggaran pengadaan PDH

Data penelitian menunjukkan bahwa 31,8% responden menyatakan tidak sesuai, 55,3% kurang sesuai dan 12,9% sesuai. Jawaban responden tersebut jika diakumulasikan terdapat 87% yang menyatakan tidak sesuai antara anggaran (perencanaan) dengan kebutuhan anggaran untuk pengadaan PDH Polri. Kondisi anggaran semacam itu merupakan gambaran norma indeks kapor PDH Polri di wilayah penelitian yang akhirnya menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan standarisasi kualitas PDH Polri.

b) Frekuensi pengadaan PDH

Tabel 14. Frekuensi pengadaan PDH Polri

Tamtama & Bintara (%)			Perwira (%)			Akumulasi (%)		
Sekali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Sekali dalam dua tahun	Sekali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Sekali dalam dua tahun	Sekali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Sekali dalam dua tahun
69.4	11.8	18.8	76.8	9.5	13.7	73.1	10.65	16.25

Tabel 14 menunjukkan bahwa pembagian PDH Polri cenderung setahun hanya sekali, satu stel, yang pada umumnya diberikan dalam bentuk pakaian jadi. Hal itu sangat berpeluang tingginya ketidakcocokan dengan anatomi tubuh personel sehingga membuat tidak nyaman. Akibatnya, personel harus mengeluarkan biaya sendiri untuk kebutuhan perombakan.

c) Efisiensi & Efektifitas

Tabel 15. Efektifitas dan efisiensi pembagian PDH Polri

Bentuk pembagian	Keinginan (%)		Akumulasi
	Tamtama & Bintara	Perwira	
Bahan pakaian dengan ongkos jahit yang sesuai dengan standar setempat	54.4	61.1	57.75
Pakaian jadi, tetapi dengan pengukuran dan penjahitan oleh penjahit setempat, bukan oleh garment	45.6	38.9	42.25

Tabel 15 menunjukkan ada keseimbangan keinginan personi Polri dalam pembagian PDH Polri. Sebanyak 57,75% personel menginginkan dalam bentuk bahan pakaian dengan ongkos jahit yang sesuai dengan standar setempat, sedangkan 42,25% personel menginginkan pembagian PDH dalam bentuk pakaian jadi, tetapi dengan pengukuran dan penjahitan oleh penjahit setempat, bukan oleh garment.

d) Sistem Pengadaan

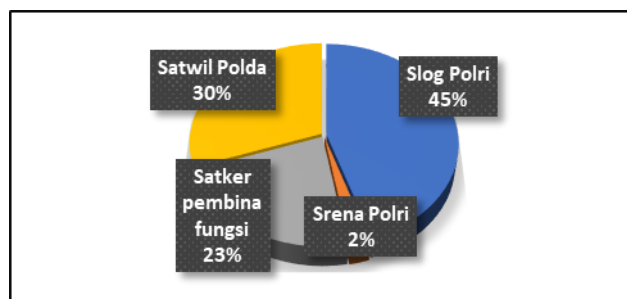
Dalam perspektif manajemen logistik, ketidakseragaman PDH Polri dari segi warna dan kualitas bahannya disebabkan oleh manajemen pengadaan PDH yang didesentralisasi ke satwil dan satker.

e) Pengawasan Mutu PDH

Dalam kaitannya dengan tupoksi staf logistik, manajemen pengawasan mutu barang atau kualitas PDH cenderung rendah. Pakaian dinas yang telah dibagikan ke tingkat satwil jarang dievaluasi dan dikaji secara komprehensif sehingga

tidak memperoleh umpan balik yang valid mengenai standar kualitas PDH yang dibagikan ke pada anggota Polri. Disamping itu, ada kecenderungan tidak menerapkan standar baku SNI 56 : 2017 dan tidak melaksanakan ISO 9001:2015 tentang Audit Vendor.

f) Desentralisasi Pengadaan



Gambar 3: Pendapat responden tentang Satker Pengadaan PDH Polri

Berdasarkan gambar 3 diketahui bahwa responden sebagian besar menjawab Slog Polri sebagai Satker yang mengadakan PDH Polri. Sebanyak 45 menyatakan bahwa pengadaan PDH di tingkat Satwil (Polda), 30% menyatakan diadakan di Satker 23%, dan yang menjawab di Satker Perencanaan sebanyak 2%.

4. Manajemen logistik dan distribusi PDH

Ada beberapa indikator yang digunakan untuk membahas analisis mengenai Manajemen logistik dan distribusi pakaian dari PDH Polri :

- Kewenangan Pengadaan Logistik PDH Polri
- Analisis kebutuhan dan peruntukan

Dari indikator diatas diperoleh data dilapangan sebagai berikut

a) Kewenangan Pengadaan Logistik PDH Polri

Tabel 16: Pendapat tentang Satker yang lebih kompeten dalam perencanaan pengadaan dan pendistribusian PDH Polri

Satker	Pendapat (%)
Slog Polri	44.9
Srena Polri	2.3
Satker pembina fungsi	22.5
Satwil Polda	30.3

Pada tabel 16 menunjukkan bahwa sebagian besar personel Polri, khususnya kelompok Perwira, menginginkan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian PDH Polri sebaiknya dilakukan oleh Slog Polri yang berkoordinasi dan bekerja sama dengan Rolog Polda sehingga warna dan kualitas bahan pakaian menjadi seragam karena pada saat ini unsur keseragaman tersebut belum terpenuhi.

- b) Analisis kebutuhan dan peruntukan dalam pengadaan dan distribusi PDH Polri kepada responden Perwira, selain ditanyakan pendapatnya tentang Satker yang sebaiknya diberi wewenang sebagai fungsi dalam perencanaan, pengadaan dan pendistribusian PDH Polri, juga ditanyakan pendapatnya tentang kesesuaian kebijakan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian PDH Polri, dengan kebutuhan dan peruntukannya. Hasilnya menunjukkan bahwa 31,8% personel menyatakan tidak sesuai, 55,3% kurang sesuai dan 12,9% sesuai.

## 5. Industri tekstil

Industri tekstil merupakan salah satu variable yang mempengaruhi standar kualitas warna kain yang digunakan sebagai bahan PDH Polri. Menurut Balai Besar Tekstil (2020), proses tekstil kain seragam Polri harus merujuk pada SNI 56 : 2017, yaitu kain seragam Pakaian Dinas Harian (PDH) Polri diproses melalui pertununan, pencelupan, penyempurnaan, dan pengemasan. Ini artinya Slog Polri sebagai pengembang tupoksi bidang logistik dapat terlibat dalam proses penentuan jenis kain seragam dinas Polri, baik warna, komposisi, kekuatan, ataupun ketahanan kain.

Sementara itu, untuk menjamin pengawasan mutu, dapat merujuk pada ISO 9001:2015 tentang Audit Vendor, baik melalui sertifikasi, uji laboratorium maupun penelitian kasus. Audit Vendor pada dasarnya merupakan Satker bidang penelitian dan pengembangan karena materi yang diaudit berhubungan dengan kualitas barang / material bahan pakaian kapur PDH. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa industri tekstil yang selama ini sebagai produsen dan/atau pemasok kain pakaian dinas PDH Polri pabrikasinya semua di Pulau Jawa, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, antara lain industri tekstil Bandung, Semarang, Solo, dan Tangerang. Industri-industri tekstil itulah yang selama ini melayani, menyuplai, dan sebagai pemasok utama kebutuhan kapur PDH Polri seluruh Indonesia baik tingkat Mabes maupun Polda

## SIMPULAN

Jika mengacu pada rumusan variabel yang dikaji dalam penelitian ini, maka diperoleh simpulan sebagai berikut.

### A. Standardisasi Warna Nomor Paten Coklat Polisi :

1. Standar warna nomor paten dan jenis kain coklat Polri yang digunakan sebagai bahan seragam pakaian dinas harian (PDH), sampai saat ini belum memiliki nomor warna standar paten coklat polisi. Dari hasil penelitian di sebelas Polda sampel, warna coklat PDH yang digunakan cenderung tidak sama (variatif), baik antar-Polda, di internal Polda sendiri maupun di tingkat Polres. Hampir semua anggota Polri (87%) menyatakan tidak mengetahui tentang warna coklat paten pakaian dinas Polri. Personel yang mengetahui tercatat hanya 13%. Akibatnya, pakaian PDH yang dibeli secara mandiri pun warna coklatnya cenderung tidak seragam (mirip-mirip saja).
2. Penetapan Spektek/STBU yang ditetapkan oleh Slog Polri tentang warna coklat muda untuk kemeja (atasan) dan coklat tua untuk celana (bawahan), menimbulkan multitafsir sebab tidak menegaskan nomor warna coklat Polisi dan jenis kainnya. Komposisi campuran serat bahan pakaian PDH yang dinyatakan dalam Spektek/STBU terdiri dari 35% katun dan 65% polyester, serta yang 35% polyester dan 65% kapas, belum diimplementasikan secara konsisten oleh Satker dan satuan wilayah (Polda).

### B. Standardisasi Kualitas Mutu Kapur PDH Polri :

1. Standard kualitas mutu pakaian PDH Polri, ditinjau dari aspek komposisi campuran serat (bahan pakaian), ketahanan kelunturan, kekuatan kain, estetika (kerapian, ukuran), kenyamanan pada saat dipakai, dan kepuasan pemakai, pada saat ini PDH Polri berseragam dan tidak berseragam, belum memenuhi "standar kualitas baik," sebagaimana amanat SNI 56 : 2017 dan ISO 9001 : 2015, sebab baru aspek kekuatan kain yang dapat dikategorikan memenuhi standar kualitas memadai sebab kainnya tidak mudah sobek ketika dipakai tugas.
2. Standar kualitas PDH Polri cenderung rendah. Hal itu dinyatakan oleh pengguna (*user*) anggota Polri. **Pertama**, sebanyak 86% personel yang menyatakan bahwa pakaian pembagian dinas saat dipakai terasa panas, kurang menyerap keringat, mudah kusut, dan membekas terkena setrika. Sementara itu, personel yang menyatakan sebaliknya hanya 14%. **Kedua**, Ada 80% personel yang menyatakan bahwa pakaian luntur setelah dicuci rata-rata delapan kali, sedangkan yang menyatakan sebaliknya hanya 20%. **Ketiga**, 91% personel menyatakan bahwa pakaian belum nyaman dipakai saat bertugas, sedangkan yang menyatakan hanya 9%. Keempat, 96% personel menyatakan bahwa pakaian

ukurannya tidak sesuai dengan anatomi tubuh, sedangkan yang menyatakan sesuai dengan anatomi tubuh hanya 4%.

3. Untuk setiap PDH Polri yang dibagikan/didistribusikan dalam bentuk pakaian jadi, dari segi kenyamanan pada waktu dipakai, 90,75% personil Polri menyatakan belum nyaman, dan dari segi ukuran anatomi tubuh, 96,35% personil Polri menyatakan tidak cocok, padahal sebelumnya sudah dilakukan pengukuran. Akibatnya, 94,25% dari mereka merombak (vermak) PDH bagiannya dengan biaya antara Rp20.000--100.000. Sementara itu, personel yang tidak merombak PDH hasil pembagian 5,75%. Temuan lain terkait hal ini adalah pada umumnya personel melakukan pengadaan mandiri dengan biaya antara Rp400.000--750.000.
4. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas mutu PDH Polri dapat dikemukakan sebagai berikut.
  - a) Ruang atau tempat personel bertugas. Mereka yang bertugas lebih banyak di ruangan (*indoor*), PDH-nya cenderung awet. Sementara itu, personel yang bertugasnya di luar ruangan (*outdoor*) yang banyak kena sinar matahari, cenderung cepat luntur dan kualitas kain cenderung menurun (cepat rusak).
  - b) Kondisi geografis dan iklim wilayah. Wilayah dengan kondisi geografis perbukitan, dan/atau kelembaban rendah dengan suhu sedang, PDH Polri cenderung awet.
  - c) Pemeliharaan dan perawatan. Sebagian besar personil Polri tidak mengetahui cara merawat PDH agar kualitasnya tetap terjaga.
  - d) Kemampuan pengadaan PDH Polri cadangan secara mandiri. Pada saat ini Polri baru bisa memberikan PDH setahun sekali sebanyak satu stel per anggota dan belum merata untuk seluruh fungsi. Akibatnya, kemampuan penggunaan PDH sebagai pengganti atau cadangan sangat beragam.
  - e) Sistem pengukuran dan penjahitan. Pada saat ini pengukuran pengadaan PDH belum berbasis metode pengukuran penjahit biasa, tetapi berbasis pada metode pengukuran garmen yang dinyatakan dalam nomor (15, 16, 17, 18 dst) atau huruf (S, M, L, X, XL, XXL, dst). Demikian halnya dengan sistem penjahitan yang cenderung dilakukan dengan sistem garmen dan bukan sistem penjahit biasa. Akibatnya, ketika PDH diterima personel, banyak dari mereka yang harus melakukan perombakan untuk menyesuaikan dengan anatomi tubuh atau bahkan ada yang tidak dipakai sama sekali. Dengan begitu, ada beban keuangan tambahan bagi personel untuk menyiapkan pakaian PDH pengganti.

### C. Implementasi Manajemen Logistik Polri dalam proses pengadaan dan distribusi PDH Polri

1. Sistem pengadaan PDH Polri masih belum berbasis analisis kebutuhan dan tuntutan personel di lapangan.
2. Penggunaan nomenklatur pengadaan PDH Polri dalam DIPA Polri menjelaskan bahwa sistem pengadaan dilakukan dalam bentuk pakaian jadi/stelan sehingga hal ini mengakibatkan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan dan tuntutan personel di lapangan. Ada yang mendapatkan jatah PDH, ada pula yang tidak mendapatkannya di setiap tahunnya.
3. Pembagian PDH dalam bentuk "*all in*" (pakaian jadi) cenderung tidak efisien dan efektif sebab personel Polri 94% merombak (vermak) pakaian dinas pembagian. Hanya 6% personel Polri yang tidak merombak (vermak) PDH-nya. Biaya memvermak pakaian berkisar antara Rp25.000 - 200.000. Selain biaya untuk merombak (vermak) PDH yang diterimanya, anggota Polri juga mengeluarkan biaya lagi untuk membeli pakaian dinas secara mandiri dengan harga (SBU) per stel antara Rp450.000 - 750.000 untuk bahan kain kelas II, Rp800.000 - 1.800.000 untuk bahan kain kelas I. Karena itu, sistem pengadaan PDH lebih efisien dan efektif dilakukan dalam bentuk bahan baku kain dan ongkos jahit daripada dalam bentuk "*all in*."
4. Standardisasi Norma Indeks Kapur PDH untuk kebutuhan anggota perorang belum tegas jumlahnya dan berapa kali menerimanya setiap tahun. Karena itu, sangat dibutuhkan penentuan alokasi pagu anggaran kebutuhan PDH per orang sehingga pengadaannya jelas berdasarkan asas kebutuhan dan tuntutan personel di lapangan.
5. Adapun faktor-faktor kendala yang mempengaruhi kualitas manajemen logistik Polri di bidang pengadaan PDH saat ini dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a) Perencanaan (politik anggaran) belum menerapkan prinsip *based on budget*. Alokasi pagu anggaran kapor PDH saat ini belum berdasarkan pendekatan *based on budget* yang berbasis pada analisis kebutuhan dan keperluan kelengkapan perorangan sesuai jumlah anggota Polri yang bertugas di suatu wilayah (Polda). Ada disparitas anggaran kapor PDH pada setiap Polda karena pagu anggarannya bergantung pada perolehan DIPA yang disusun oleh Srena Polri. Selain itu, penetapan anggaran belum berbasis pada harga pasar dan norma indeks harga PDH masih di bawah standar biaya umum (SBU) sehingga mempengaruhi standar kualitas PDH Polri.
- b) Pelaksanaan pengadaan dan distribusi PDH secara umum telah dapat dilaksanakan oleh fungsi logistik di tingkat Mabes dan kewilayahan (Polda). Namun, realisasi pengadaan dan distribusi PDH tersebut masih belum berdasarkan pada analisis kebutuhan dan tuntutan personel dan peruntukan kapor PDH tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Selain itu, masih belum tegasnya berapa norma indeks PDH per anggota Polri per tahun. Akibatnya, pembagian tidak merata. Sebagian personel tidak menerima PDH setiap tahun. Hal ini menambah beban biaya anggota, sedangkan pakaian dinas (PDH) adalah hak mendasar yang wajib diterima personel Polri dari negara minimal setahun sekali sehingga tidak setiap Polda tidak sama.
- c) Sistem pengadaan kapor PDH Polri secara general belum mempertimbangkan wilayah tugas (geografi) dan ruang tempat personel melaksanakan tugas karena karakteristik jenis kain berbeda-beda peruntukannya untuk daerah panas, dingin, pegunungan, di dalam ruangan ber-AC, luar ruangan (*outdoor*) yang terkena terik matahari dan sebagainya. Semua itu merupakan kendala yang mempengaruhi kualitas PDH Polri.
- d) Pengawasan (*controlling*) kualitas PDH Polri belum berbasis uji kelayakan mutu dan belum konsisten menerapkan Perkap Nomor 17 Tahun 2011 tentang kewajiban melaksanakan uji laboratorium, menerapkan SNI nomor 56 : 2017, dan penerapan ISO 9001:2015 tentang Audit Vendor.

#### **D. Implementasi Manajemen Logistik Polri dalam proses pengadaan dan distribusi PDH Polri**

1. Semua sampel uji memiliki ketahanan kusut dan luntur warna yang relatif baik.
2. Komposisi bahan seragam bervariasi di antara Polda.
3. Hasil analisis beda warna menunjukkan sampel uji (atasan/bawahan) memiliki nilai warna yang berbeda dengan warna utama (pembanding). Hasil uji rata-rata nilai beda warna di atas 1, terutama untuk kain seragam atasan dengan sebaran (deviasi) sangat tinggi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adya Barata, Atep. (2004). *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Cetakan ke 2. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Aminudin. (2010). "Pengaruh Kualitas Jasa terhadap Kepuasan Konsumen," BPRS Bumi Rinjai Kota Batu".
- Eveline, Siregar. (2011). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ishikawa, Kaoru. (1989). *Teknik Penuntun Pengendalian Mutu*. Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa.
- Indrawan, Irijus .(2015) *Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana*". Yogyakarta: Deepbulis.
- Peter Salim dan Yenny Salim. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Perss.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 102/2000 tentang Standardisasi Nasional.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2017 tentang STOK tingkat Mabes Polri.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri.